

DRAFT_Jurnal_Publik_Civica_Implementasi_Program_Ketahanan_Pangan-1745889722704

by Turnitin™

Submission date: 28-Apr-2025 08:23PM (UTC-0500)

Submission ID: 2660296846

File name: k_Civica_Implementasi_Program_Ketahanan_Pangan-1745889722704.pdf (143.82K)

Word count: 3897

Character count: 26124

**Implementasi Program Ketahanan²¹ Pangan Dalam Upaya Pemenuhan Lumbung
Pangan Desa Berkelanjutan di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Sidoarjo**

Civica Silmi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
caca@webmynddev.com
Isna Fitria Agustina²
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
isnaagustina@umsida.ac.id

¹⁴
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo⁶ dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kelompok agribisnis, dan masyarakat yang terlibat dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai sektor agribisnis telah diidentifikasi sebagai fokus program ketahanan pangan, implementasi kebijakan mengalami ketimpangan dalam alokasi perhatian, serta keterbatasan dalam sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Tantangan utama yang dihadapi antara lain ketidakmerataan manfaat program, ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan lapangan, serta rendahnya partisipasi aktif dari kelompok tani dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kendala dalam koordinasi antar lembaga dan kekuatan aktor dalam pengambilan keputusan juga turut mempengaruhi efektivitas program. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo memerlukan perbaikan dalam manajemen program, peningkatan partisipasi masyarakat, serta alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: **Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Agribisnis, Grindle**

⁵
ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the food security program in Jumputrejo Village, Sukodono Sub-district, Sidoarjo District, using Grindle's Policy Implementation Model (1980). The method used is a descriptive qualitative approach with data collection through semi-structured interviews and observation. Research informants included the village head, agribusiness groups and communities involved in the program. The results show that although various agribusiness sectors have been identified as the focus of the food security program, policy implementation suffers from imbalances in the allocation of attention, as well as limitations in adequate resources and infrastructure. The main challenges faced include inequality of program benefits, budget mismatches with field needs, and low active participation of farmer groups in decision-making. In addition, constraints in inter-agency coordination and the power of actors in decision-making also affect the effectiveness of the program. The conclusion of this study is that the success of the food security program in Jumputrejo Village requires improvements in program management, increased community participation, and more targeted resource allocation.

Keywords: Policy Implementation, Food Security, Agribusiness, Grindle

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis di Indonesia yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional (Rumawas dkk., 2021). Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan (Salasa, 2021). Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga akses yang merata, pemanfaatan yang optimal, serta stabilitas dalam jangka panjang (Salasa, 2021). Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan pangan harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang menjadi basis utama produksi pangan nasional. Desa memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pangan (Nartin dkk., 2024). Sumber daya menjadi faktor kunci dalam menentukan suksesnya pelaksanaan kebijakan (Karim dkk., 2024).

Salah satu strategi yang telah lama diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa adalah melalui lumbung pangan desa (Salasa, 2021). Lumbung pangan desa berfungsi sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan pangan akibat gagal panen, bencana alam, atau fluktuasi harga pasar. Selain itu, lumbung pangan juga berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok (Abdurrohman dkk., 2021). Dengan adanya lumbung pangan desa yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan, masyarakat desa dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar serta memperkuat kemandirian pangan desa.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa bertujuan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan bergizi seimbang berbasis potensi lokal, serta mendorong desa untuk memperkuat lumbung pangan dan mengembangkan strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2022). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mewajibkan alokasi minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan akibat faktor alam, ekonomi, dan sosial (Presiden Republik Indonesia, 2021), serta untuk memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan lumbung pangan desa (Wijayanti, dkk., 2023). Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi langkah awal dalam mengatur berbagai urusan (Asiah & Laraga, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo dalam laporan Kecamatan Sukodono Dalam Angka 2024, Desa Jumputrejo tidak mengalami panen padi maupun palawija (kedelai dan kacang hijau) selama tahun 2023, yang mencerminkan

permasalahan serius dalam sektor pertanian desa (Badan Pusat Statistik Sidoarjo, 2024). Ketiadaan panen ini tidak hanya mengancam ketersediaan pangan pokok, tetapi juga memaksa masyarakat bergantung pada pasokan luar daerah, yang berisiko meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan menurunkan ketahanan pangan lokal (Hasanah & Fauzi, 2024). Selain itu, kegagalan panen palawija mengindikasikan rendahnya diversifikasi pangan, padahal tanaman tersebut seharusnya menjadi sumber alternatif karbohidrat dan protein bagi masyarakat.

Pada tahun 2024, Desa Jumputrejo mengalami kenaikan total jumlah anggaran yang digelontorkan untuk program ketahanan pangan. Berdasarkan pada Tabel 1, anggaran yang digelontorkan sangat besar namun Desa Jumputrejo tidak memiliki area panen padi dan palawija, sesuai dengan data oleh BPS Kabupaten Sidoarjo. Ini menjadikannya menarik untuk dianalisis terkait implementasi kebijakan program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo.

Tabel 1. Anggaran Desa Dalam Program Ketahanan Pangan Tahun 2023-2024

2023					
Pelatihan	Bibit	Perlengkapan Kolam	Tenaga Kerja	Sewa Alat Berat	Lainnya
66.996.600	50.000.000	47.054.000	20.000.000	15.000.000	600.000
2024					
Padat Karya	Bibit Sapi dan Ikan	Hidroponik	Peternakan dan Perikanan	Pelatihan	
88.750.000	92.171.200	45.000.000	50.000.000	36.400.000	

Sumber: Pemerintah Desa Jumputrejo, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Desa pada Tabel 2, Desa Jumputrejo telah melaksanakan berbagai sub-program ketahanan pangan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, seperti budidaya padi (117 hektar dengan hasil 1,8 ton), perkebunan melon (300 m² dengan 312 bibit), peternakan sapi (2 ekor), dan perikanan (1.500 bibit ikan nila). Namun, meskipun berbagai inisiatif ini telah dilakukan, hasil yang dicapai masih terbatas dan belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat desa. Produksi yang dihasilkan masih jauh dari skala yang dapat meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, baik dalam ketersediaan, distribusi, maupun pemanfaatan pangan, menunjukkan bahwa program ini belum menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan perekonomian desa.

Tabel 2. Luas Lahan dan Bibit Program Ketahanan Pangan Desa Jumputrejo Tahun 2024

Sub program ketahanan pangan	Komoditas	Luas lahan / jumlah bibit
Pertanian	Padi	117 Ha / 1,8 ton
Perkebunan	Melon	300 m ² / 312 bibit
Peternakan	Sapi	2 ekor sapi
Perikanan	Ikan nila	1500 bibit

Sumber: Pemerintah Desa Jumputrejo, 2025 (Data Diolah)

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas implementasi program ketahanan pangan di berbagai desa dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Fernanda dan Agustina

meneliti implementasi program di Desa Permisan menggunakan teori Edwards III dan menemukan kendala pada sumber daya manusia serta koordinasi antar-stakeholder, namun belum menyoroti desa dengan stagnasi produksi pangan (Fernanda & Agustina, 2024). Ariyanti mengkaji implementasi di Desa Tropodo untuk penanganan stunting anak, menemukan bahwa sosialisasi masih kurang meskipun didukung sarana dan ¹⁶ sarana yang memadai (Ariyanti, 2024). Hartati, Yahya, dan Sutrisno menyoroti program ketahanan pangan di bidang pertanian cabai merah di Desa Mayang Sari yang belum optimal akibat kurangnya dukungan pemerintah dan faktor alam (Hartati dkk., 2024). Sementara itu, Darmawan mengaitkan kebijakan ketahanan pangan di Desa Pandak dengan SDGs selama pandemi, menunjukkan bahwa strategi desa cukup baik namun masih menghadapi tantangan dalam peningkatan pendapatan dan edukasi gizi (Darmawan, 2023). Adapun Sajidin, Antuli, dan Sareong meneliti implementasi program di Kabupaten Bogor sebagai upaya pengendalian inflasi dan menunjukkan hasil yang positif berdasarkan karakteristik masalah, kebijakan, dan lingkungan implementasi (Sajidin dkk., 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat *research gap* yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya kajian mendalam tentang kondisi desa yang mengalami stagnasi dalam produksi pangan, seperti Desa Jumputrejo, yang pada tahun 2023 tidak memiliki panen padi maupun palawija.

Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan ⁷ (*content*) yang mencakup kepentingan, manfaat, cakupan perubahan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya, serta konteks kebijakan (*context*) yang meliputi kekuatan dan strategi aktor, dukungan institusi, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas. Model ini efektif untuk mengidentifikasi peran birokrasi, kekuasaan, dan kelompok ⁶ kepentingan dalam implementasi kebijakan, meskipun tidak sepenuhnya membedakan variabel yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilannya (Grindle, 1980). Model ini relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Desa Jumputrejo mengalami stagnasi dalam produksi pangan, yang berisiko menimbulkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan yang lemah di tingkat desa juga ⁸ berpotensi memicu berbagai masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan gizi buruk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo dengan menitikberatkan pada strategi berbasis komunitas, seperti pengelolaan ¹⁸ lumbung pangan, guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam upaya memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan.

11

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis dan akurat sesuai kondisi lapangan, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, tindakan, dan interaksi dalam konteks tertentu (Bogdan & Biklen, 1998). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan subjek penelitian meliputi kepala desa, kelompok agribisnis, dan masyarakat yang terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi kualitatif, serta teknik sampling purposive untuk memilih informan yang relevan (Islam, Khan, & Baikady, 2022; Creswell & Creswell, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan yang relevan (Miles dkk., 2014). Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980) digunakan untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, dengan fokus pada dua aspek utama: *content* (isi kebijakan) yang melibatkan faktor internal seperti kepentingan, manfaat, dan sumber daya, serta *context* (konteks kebijakan) yang mencakup faktor eksternal seperti kekuatan aktor dan dukungan institusi (Grindle, 1980). Model ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan serta tantangan dalam implementasinya di tingkat desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Content*

Interest Affected

Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kepentingan masyarakat sebagai kelompok sasaran terakomodasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Desa Jumputrejo, berbagai sektor agribisnis seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan telah menjadi perhatian dalam program ketahanan pangan. Namun, dalam implementasinya, muncul ketimpangan dalam alokasi perhatian terhadap sektor-sektor tersebut. Petani, sebagai pelaku dominan dalam ketahanan pangan, merasa kurang diakomodasi dibanding sektor lainnya. Keterbatasan dalam pengadaan sarana produksi, pengairan yang tidak merata, hingga pemilihan penerima bantuan yang tidak sesuai bidang, menjadi indikasi bahwa kepentingan utama belum sepenuhnya menjadi prioritas. Hal ini diperkuat dengan testimoni salah satu pengurus GAPOKTAN yang juga merupakan bendahara kelompok tani, Pak Sunyoto, yang menyatakan bahwa pembahasan

anggaran dana desa sering kali tidak memperhatikan urgensi sektor pertanian, justru lebih banyak mengarah ke program baru seperti perikanan dan perkebunan. Ketika petani menghadapi kendala teknis seperti irigasi, respon dari pemerintah desa belum memuaskan.

Hal ini diungkapkan oleh Bendahara GAPOKTAN pada wawancara

"Waktu diajak musyawarah dana desa, saya menyampaikan soal irigasi yang nggak merata dan kebutuhan alat pertanian seperti pompa air. Tapi kenyataannya, pembahasan lebih fokus ke perikanan dan perkebunan. Padahal di sini, mayoritas warganya itu petani. Bantuan juga sering nggak nyasar ke yang butuh. Kadang yang aktif malah nggak kebagian."

Type of Benefits

Manfaat program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo sebenarnya telah dirasakan oleh sebagian masyarakat, seperti pelaku perkebunan melon yang kini menjadi pemasok untuk beberapa mitra. Namun, manfaat tersebut belum merata dan belum menyentuh lapisan masyarakat petani kecil secara optimal. Program pelatihan, alat, maupun bantuan pertanian masih terbatas dan tidak seluruhnya dirancang untuk meningkatkan produksi atau kapasitas petani lokal.

Kebijakan seperti sistem bagi hasil dalam peternakan menunjukkan potensi keuntungan jangka panjang. Namun dalam sektor pertanian, manfaat tersebut belum signifikan karena kendala akses pada sarana produksi dan dukungan teknis. Bahkan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) justru diberikan kepada kelompok yang tidak aktif di sektor pertanian.

Hal ini diungkapkan oleh Bendahara GAPOKTAN pada wawancara

"Bimtek malah diberikan ke karang taruna, padahal mereka itu nggak terjun langsung ke sawah. Kami petani nggak dikasih kesempatan belajar. Padahal kalau ada pelatihan teknologi pertanian, kita siap belajar dan pakai. Manfaat program ya ada, tapi belum merata."

Extent of Change Envisioned

Program ini secara ideal bertujuan untuk melakukan transformasi ketahanan pangan desa, dari sekadar produksi skala kecil menjadi sistem agribisnis berkelanjutan yang berbasis potensi lokal. Namun, perubahan besar ini belum diiringi kesiapan sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai. Adopsi teknologi baru seperti hidroponik memang telah diperkenalkan, namun penerapannya masih terbatas pada kelompok tertentu saja. Banyak petani merasa bahwa perubahan yang ditawarkan terlalu cepat tanpa pendampingan memadai. Belum ada sistem manajemen agribisnis terpadu yang

memperkuat mata rantai dari produksi hingga distribusi. Maka, meskipun arah perubahan jelas dan progresif, kesiapan masyarakat masih belum setara dengan harapan kebijakan. Hal ini diungkapkan oleh ketua umum GAPOKTAN pada wawancara

"Kalau dilihat, desa kita ini sudah mulai maju, apalagi ada hidroponik dan perikanan. Tapi untuk pertanian, petani belum siap kalau langsung disuruh ubah sistem. Harusnya ada pelatihan dulu. Perubahan itu bagus, tapi harus pelan-pelan dan sesuai dengan kondisi kita di lapangan."

Site of Decision Making

Pengambilan keputusan dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo sebagian besar dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Ini menunjukkan desentralisasi pengelolaan cukup dominan. Namun demikian, partisipasi masyarakat atau kelompok tani masih sebatas formalitas dalam forum musyawarah desa. Banyak keputusan strategis yang diambil tanpa mempertimbangkan urgensi teknis dari pelaku lapangan.

Meskipun struktur GAPOKTAN sudah terbentuk hingga level dusun, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan tidak maksimal. Dalam praktiknya, usulan kelompok tani sering kali tidak menjadi prioritas karena pemerintah desa sudah menetapkan fokus anggaran sesuai kebijakan pusat atau kecenderungan sektoral yang baru berkembang.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris GAPOKTAN pada wawancara

"Kadang kita diminta datang rapat, kasih usulan. Tapi pas penentuan anggaran, keputusan sudah ada. Kayak cuma dimintai pendapat aja, tapi hasilnya nggak dipakai. Contohnya, kita usul irigasi dan alat pertanian, malah yang dibiayai kebun melon."

Program Implementors

Para pelaksana program di lapangan terdiri dari perangkat desa dan kelompok agribisnis seperti GAPOKTAN. GAPOKTAN sudah memiliki struktur yang jelas dan tersebar di setiap dusun. Namun, tantangan utama muncul dari rendahnya inisiatif dan eksekusi anggota kelompok tani dalam merealisasikan program. Banyak yang hadir dalam rapat, namun kurang aktif saat eksekusi program berlangsung.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen implementor melalui pelatihan atau pendampingan berkelanjutan. Kelemahan implementor bukan hanya dalam hal pengetahuan teknis, tetapi juga dalam perencanaan strategis dan koordinasi lintas sektor.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tani Makmur 3 pada wawancara

"Kita sudah sering rapat dan diajak diskusi, tapi begitu program jalan, banyak yang malas. Cuma iya-iya pas rapat. Saya pikir, ini karena kurangnya pembinaan langsung. Harusnya ada pendamping dari luar atau bimtek rutin."

Resources Committed

Ketersediaan sumber daya, baik finansial, teknis, maupun infrastruktur, menjadi masalah krusial dalam implementasi program ini. Dana desa memang digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan, namun belum mencukupi kebutuhan lapangan yang besar. Bantuan bibit dan pupuk yang disalurkan sering kali terbatas, sehingga alokasi harus dibagi rata tanpa mempertimbangkan skala usaha tani.

Selain itu, pengadaan alat pertanian membutuhkan proses administratif yang panjang dan melelahkan bagi petani. Ketika petani membutuhkan pompa air, mereka harus mengajukan proposal dan menunggu kepastian yang tidak kunjung datang.

Hal ini diungkapkan oleh ketua Tani Makmur 5 pada wawancara

"Dikasih bantuan bibit, tapi jumlahnya dibatasi, nggak sesuai lahan yang kita kelola. Trus kalau mau minta alat kayak pompa air, harus bikin proposal dulu. Prosesnya lama, dan kadang nggak jelas kapan realisasinya. Padahal kita butuh cepet."

Context

Power, Interests, and Strategies of Actors Involved

Dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Jumputrejo, relasi kekuasaan dan strategi antar aktor sangat memengaruhi jalannya kebijakan. Pemerintah desa memiliki otoritas penuh sebagai aktor utama dalam distribusi bantuan dan pengambilan keputusan, sementara kelompok tani dan pelaku agribisnis lainnya berada pada posisi penerima kebijakan dengan daya tawar terbatas.

Ketimpangan kekuasaan ini menghasilkan situasi di mana keputusan program tidak selalu mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat agraris. Misalnya, kelompok tani yang lebih aktif dan membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan prioritas, sedangkan penerima bantuan sering kali tidak memiliki ketertarikan atau kapabilitas dalam bidang pertanian. Bahkan, muncul fenomena provokatif di kalangan petani yang menyebarkan sikap apatis terhadap program dengan anggapan bahwa bantuan akan tetap turun tanpa usaha berarti. Ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya strategi advokasi dari pihak kelompok tani sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh ketua GAPOKTAN sektor perikanan pada wawancara

"Kadang ada petani yang bilang 'halah nggak usah ngurus, nanti juga dapat bantuan lagi'. Nah, ini bikin semangat petani lain turun. Terus, ada juga bantuan yang nggak tepat sasaran. Harusnya yang nerima itu yang bener-bener kerja di lahan, tapi malah yang nggak aktif dapat alat."

Hal ini didukung oleh pernyataan ketua umum GAPOKTAN pada wawancara

"Kami di GAPOKTAN sudah berusaha mengusulkan kebutuhan petani, tapi kadang kalah sama kepentingan lain. Keputusan tetap di tangan desa. Kita nggak bisa ngotot, soalnya proses musdes juga kadang cuma formalitas aja."

Institution and Regime Characteristics

Karakteristik kelembagaan yang berkembang di Desa Jumpurejo cukup kompleks. Di satu sisi, kelembagaan GAPOKTAN telah terbentuk hingga tingkat dusun dan memiliki struktur yang jelas, menunjukkan kesiapan kelembagaan formal. Namun di sisi lain, koordinasi antar lembaga desa, kelompok tani, dan pelaku agribisnis masih belum sinergis. Kebijakan cenderung sektoral dan tidak dirancang sebagai sistem yang integratif antar sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

Regulasi yang mengatur penggunaan dana desa juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak perangkat desa yang lebih memilih menjalankan program-program baru yang dianggap inovatif dan "menarik perhatian", ketimbang memperkuat pondasi utama seperti infrastruktur irigasi atau penguatan produktivitas petani. Di sisi lain, kelompok tani belum memiliki kekuatan institusional yang cukup untuk menekan atau menyeimbangkan dominasi pemerintah desa dalam hal kebijakan.

Hal ini diungkapkan oleh ketua GAPOKTAN sektor perkebunan pada wawancara

"Memang kelembagaan kita sudah bagus, tapi masih berjalan sendiri-sendiri. Kadang kelompok tani nggak tahu program perikanan, begitu juga sebaliknya. Kita butuh sistem koordinasi biar semua sektor bisa jalan bareng."

Hal ini didukung oleh pernyataan sekretaris GAPOKTAN pada wawancara

"Kalau dari aturan desa sih jelas, tapi dalam praktiknya, koordinasi masih lemah. Kadang kita baru tahu ada program baru pas sudah jalan. Jadi ya agak susah menyelaraskan antar kelompok."

Compliance and Responsiveness

Kepatuhan masyarakat terhadap program ketahanan pangan cukup beragam. Masyarakat pada dasarnya antusias menerima bantuan, namun tingkat respons dan keterlibatan aktif dalam program masih rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain proses birokrasi yang rumit, minimnya pendampingan teknis, serta kurangnya kejelasan hasil jangka pendek dari program yang dijalankan.

Misalnya, dalam kasus perikanan dan perkebunan, masyarakat menerima bantuan alat dan pelatihan, namun pelaksanaannya masih terbatas. Banyak petani atau pelaku usaha agribisnis yang hadir dalam pelatihan hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, bukan karena niat untuk mengembangkan usaha. Sementara dalam sektor peternakan, walau kebijakan desa dianggap mendukung, namun keterlibatan masyarakat masih terbatas pada

kegiatan tahunan seperti penjualan sapi saat Idul Adha. Belum ada sistem insentif atau evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program.

Hal ini diungkapkan oleh ketua GAPOKTAN sektor peternakan pada wawancara

"Desa memang mendukung program peternakan. Tapi karena sistemnya jual beli saat Idul Adha, ya masyarakat cuma fokus di momen itu aja. Belum ada rencana jangka panjang untuk pembibitan. Pakan juga ditanggung sendiri, jadi banyak yang mikir dua kali."

Hal ini didukung oleh pernyataan ketua Tani Makmur 2 pada wawancara

"Saya lihat masyarakat itu mau sebenarnya, tapi kadang ribet. Mau minta alat harus proposal, prosesnya lama. Trus kadang kalau udah dapet, nggak tahu cara pakainya. Harusnya ada pendampingan terus."

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Jumpurejo menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah mencakup berbagai sektor agribisnis, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, hasil yang dicapai belum optimal. Kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala terkait dengan kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, kesulitan dalam distribusi bantuan, dan terbatasnya pelatihan untuk para pelaku agribisnis. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih minim, dan birokrasi yang rumit menghambat kelancaran pelaksanaan program. Oleh karena itu, meskipun ada potensi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan, program ini masih membutuhkan penguatan dalam aspek perencanaan, dukungan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat agar dapat mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas Program Ketahanan Pangan, disarankan agar pemerintah desa memperbaiki mekanisme perencanaan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, khususnya kelompok tani, dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, program ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan, serta simplifikasi prosedur birokrasi agar akses terhadap bantuan lebih mudah. Pengalokasian dana juga perlu diperhatikan agar lebih fokus pada kebutuhan prioritas sektor pertanian, dengan menyediakan dukungan teknis dan alat pertanian yang memadai. Pengembangan sinergi antara sektor agribisnis dan lembaga desa serta penyusunan strategi pengembangan jangka panjang juga sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to International School Hong Kong Student Paper	8%
2	e-jurnal.nobel.ac.id Internet Source	1%
3	journal.unpar.ac.id Internet Source	1%
4	banggaipost.com Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	<1%
7	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%
8	Submitted to Queensland University of Technology Student Paper	<1%
9	www.scilit.net Internet Source	<1%
10	jurnal.univrab.ac.id Internet Source	<1%
11	jurnaluniv45sby.ac.id Internet Source	<1%

12	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
14	stia-binataruna.e-journal.id Internet Source	<1 %
15	masrogultom.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	adoc.pub Internet Source	<1 %
17	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
19	badandiklat.jatengprov.go.id Internet Source	<1 %
20	www.scribd.com Internet Source	<1 %
21	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
22	"Abstracts", Public Health Nutrition, 2013 Publication	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches

Off

DRAFT_Jurnal_Publik_Civica_Implementasi_Program_Ketahanar
1745889722704

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10